



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA
PURBALINGGA**

Jl. Tentara Pelajar No. 22 Purbalingga Telepon (0281) 891016,
896645 Fax. 893279

**LAPORAN KEUANGAN
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA
TAHUN 2020**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
NERACA
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN ARUS KAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA PURBALINGGA



DAFTAR ISI

	Hal	
Bab I	Pendahuluan	4
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	4
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	6
	1.3 Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	7
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	10
	2.1 Umum	10
	2.2 Struktur Ekonomi	11
	2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi	11
	2.4 Kebijakan Keuangan	11
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	13
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	13
	3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	14
Bab IV	Kebijakan Akuntansi	15
	4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	15
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	16
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	30
	5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
	5.1.1 Penjelasan Umum atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	30
	5.1.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	31



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

5.2	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	46
5.3	Neraca	47
5.3.1	Posisi Keuangan Secara Umum	47
5.3.2	Penjelasan atas Pos-pos Neraca	49
5.4	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	69
5.4.1	Penjelasan Umum atas Pos-Pos Laporan Operasional	69
5.4.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	70
5.5	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas	78
5.5.1	Penjelasan Umum atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	78
5.5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	78
5.6	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	85
Bab VI	Penutup	87



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 232 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang mewajibkan entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD, telah dimulai era baru dalam penerapan standar akuntansi pada Pemerintah Daerah. Jika sebelum tahun 2016, Pemerintah Daerah masih diperbolehkan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Kas Menuju Akrual (*Cash Toward Accrual*), maka mulai tahun 2016 dan seterusnya, semua Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual secara keseluruhan untuk semua transaksi keuangan.

Salah satu konsekuensi dari penerapan SAP Berbasis Akrual adalah bertambahnya jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Berdasarkan Permendagri 79 Tahun 2018 maka ada 7 (lima) jenis Laporan Keuangan yang harus disusun oleh entitas akuntansi berdasarkan SAP Berbasis Akrual, yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

3. Neraca

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan Keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga diharapkan dapat menyediakan informasi tentang:

- a. sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

- f. perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga disusun berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- q. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI.
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- s. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- t. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, dasar hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target kinerja APBD.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat penjelasan entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat penjelasan mengenai pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dari basis kas menuju akrual ke basis akrual serta rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan SKPD, sebagai berikut:

1. Penjelasan atas Pengaruh Perubahan Kebijakan Akuntansi dari Basis Kas Menuju



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Akrua (*Cash Toward Accrual Basis*) ke Basis Akrua (*Accrual Basis*) pada Laporan Keuangan Tahun 2020.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Realisasi Anggaran
 - a. Pendapatan – LRA
 - b. Belanja
4. Neraca
 - a. Aset
 - b. Kewajiban
 - c. Ekuitas
5. Laporan Operasional
 - a. Pendapatan – LO
 - b. Beban
6. Laporan Arus Kas
7. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI PENUTUP

Memuat penjelasan mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD, dan kewajiban kontinjensi.



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Umum

Secara umum, Kondisi perekonomian Purbalingga menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang tetap menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB atas dasar harga (adh) Berlaku dan atas dasar harga (adh) Konstan, maupun PDRB Per Kapita.

PDRB perkapita Kabupaten Purbalingga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Purbalingga rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per kapita secara “riil” juga selalu meningkat dikisaran 5,7%. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,08 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan perkapita tersebut tidak saja terjadi secara kuantitas tetapi juga terjadi secara kualitas, sebagaimana tabel di bawah.

Tabel PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga (miliar rupiah)
Tahun 2015-2019

PDRB / Kapita	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan	
	Pertahun	Perbulan	Pertahun	Perbulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

2015	18.426,16	1.535,51	14.130,61	1.177,55
2016	19.984,16	1.665,35	14.816,43	1.234,70
2017	21.439,65	1.786,64	15.612,29	1.301,02
2018	23.190,33	1.932,53	16.458,71	1.371,56
2019	24.918,08	2.076,51	17.387,94	1.448,99

Sumber: *purbalinggakab.bps.go.id*

2.2. Struktur Ekonomi

Sampai dengan tahun tahun 2005, struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan industri. Sektor perkebunan diwakili oleh perkebunan kelapa yang menghasilkan gula merah (gula kelapa) sedangkan sektor industri diwakili oleh industri kerajinan rambut palsu dan bulu mata, selain itu juga ada industri pengolahan kayu yang cukup banyak.

Tapi sejak tahun 2005, sektor pariwisata mulai berkembang seiring dengan pembangunan dan pengembangan pusat-pusat rekreasi baru di Purbalingga seperti Obyek Wisata Air Bojongsari (*Owabong*), Sanggar Luri Ilmu Park (*Sanggaluri Park*), dan Purbasari Pancuran Mas. Demikian juga dengan sektor industri, pertumbuhan industri kerajinan rambut palsu semakin banyak dan tersebar hampir di seluruh area wilayah Kabupaten Purbalingga.

2.3. Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga mengalami *trend* yang semakin baik, sebagaimana terlihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi 3 tahun terakhir yang terus mengalami kenaikan.

2.4. Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan APBD-P TA 2020 tidak bisa dilepaskan dari perubahan asumsi ekonomi makro APBD-P TA 2020 maupun perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD-P TA 2020. Oleh karena itu, kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga TA 2020 adalah sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, peningkatan



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

kualitas SDM pengelola PAD, mendorong percepatan kinerja dan ketepatan setoran pendapatan;

- 2) Memperkuat peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD dari sektor BUMD;
- 3) Peningkatan koordinasi penerimaan yang bersumber dari bagi hasil maupun dana perimbangan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.

B. Kebijakan Beban Daerah

Kebijakan belanja daerah dalam APBD-P TA 2020 diarahkan pada:

- 1) Pemenuhan alokasi kebutuhan anggaran belanja operasional dan belanja pegawai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan tetap melakukan peningkatan efisiensi belanja SKPD untuk belanja operasional serta melakukan penajaman komposisi belanja prioritas.
- 2) Peningkatan stimulus untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan aksesibilitas wilayah dan penyediaan infrastruktur dasar sosial dan ekonomi, dengan tetap memperhatikan perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, serta pengembangan jaminan sosial dan perlindungan masyarakat miskin serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- 3) Pelaksanaan keberpihakan (*affirmative action*), terutama terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan industri kecil dan industri kreatif.
- 4) Merencanakan ulang kegiatan-kegiatan besar yang telah dianggarkan dengan memperhatikan ketercukupan waktu penyelesaian maupun sumber daya yang tersedia.



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum, pengelolaan keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik. Salah satu indikatornya adalah realisasi BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2020, yaitu realisasi pendapatan sebesar **Rp.113.351.405.492,00** atau mencapai **141,69%** dan realisasi belanja sebesar **Rp.129.012.639.486,00** atau mencapai **100,58%**

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

1. Realisasi Pendapatan dari Pendapatan BLUD sebesar Rp.113.351.405.492,00 atau 141,69 % dari target sebesar Rp.80.000.000.000,00 sehingga terdapat surplus pendapatan sebesar Rp.33.351.405.492,00.
2. Realisasi Belanja dari dana APBD Rp.40.184.090.474,00 atau 98,90% dari anggaran sebesar Rp.40.629.667.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran APBD sebesar Rp.445.576.526,00
3. Realisasi Belanja BLUD sebesar Rp.88.828.549.012,00 atau 101,35 % dari anggaran sebesar Rp.87.641.355.000,00 sehingga terdapat defisit anggaran BLUD sebesar Rp.1.187.194.012,00.
4. Surplus Anggaran BLUD sebesar Rp.32.164.211.480,00 berasal dari surplus Pendapatan BLUD sebesar Rp.33.351.405.492,00 dikurangi dengan defisit Belanja BLUD sebesar Rp.1.187.194.012,00.

B. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2019

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2019, realisasi anggaran tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

-
1. Realisasi Pendapatan BLUD 2020 adalah Rp.113.351.405.492,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.9.189.863.775,00 atau naik 8,82% dari realisasi Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp.104.161.541.717,00.
 2. Realisasi Belanja dari dana APBD adalah Rp.40.184.090.474,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.7.858.659.042,00 atau turun 16,36% dari realisasi Belanja APBD tahun 2019 sebesar Rp.48.042.749.516,00
 3. Realisasi Belanja BLUD adalah Rp.88.828.549.012,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.8.717.387.781,00 atau turun 8,94% dari realisasi Belanja BLUD tahun 2019 sebesar Rp.97.545.936.793,00

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2020 RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga mengalami hambatan dan kendala, diantaranya :

1. Tagihan belanja bahan obat-obatan, alat pakai habis dan bahan laboratorium tidak dapat dibayar di tahun anggaran 2020. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pelayanan namun namun tidak cukup dana karena ada hambatan dalam proses pembayaran klaim BPJS Kesehatan. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, BPJS baru membayar klaim sampai dengan pelayanan bulan Oktober 2020.
2. Pasien yang belum bisa melunasi biaya perawatan juga merupakan kendala dalam pencapaian target pendapatan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga. Piutang Pelayanan Kesehatan yang timbul karena pasien tidak dapat melunasi biaya perawatan baik sebagian maupun seluruhnya, pihak RSUD telah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan agar nilai piutang tersebut tidak terlalu tinggi dengan salah satu cara mengirimkan surat tagihan kepada penanggungjawab pasien, namun demikian pada kenyataannya setiap tahun nilai piutang tersebut semakin bertambah. Pihak Manajemen RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga senantiasa berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

3. Masuknya Corona Virus Disease (Covid - 19) ke Indonesia khususnya ke Kabupaten Purbalingga pada bulan Maret 2020 menjadi suatu Pandemi yang sangat mempengaruhi naik turunnya frekwensi kunjungan Pasien sehingga berpengaruh terhadap perubahan target maupun realisasi pelaksanaan operasional Anggaran baik Belanja maupun Pendapatan di Tahun 2020.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI paling lambat pada tahun 2015. Salah satu infrastruktur pendukung yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah peraturan mengenai kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi Pemerintah Daerah, yang harus sudah ditetapkan paling lambat 31 Mei 2014.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis AkruaI sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2015 serta Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014.

Kebijakan Akuntansi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga di atas antara lain:

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggung-jawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset,

kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pengukuran Aset

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

Pengukuran aset lancar dilakukan sebagai berikut:

- a. Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal (nilai rupiah).

- b. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

- c. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

- d. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

1) Piutang Pajak Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

2) Piutang Retribusi Daerah

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Tidak Lancar	50%
3.	>3-4 Tahun	Macet	100%

3) Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/ Piutang Lain-Lain

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1.	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2.	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3.	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4.	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5.	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

- e. Beban Dibayar di Muka diukur dengan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan / dibayarkan.
- f. Persediaan diukur dan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;
- 4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar; dan
- 5) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset non lancar lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi Permanen dinilai.

Investasi Permanen pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a) Metode Biaya
adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b) Metode Ekuitas
adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.

Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap

- c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

- 2) Investasi Jangka Panjang yang bersifat non permanen diukur sebagai berikut:
- a) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - b) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - c) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

- d) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- e) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.

Dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih diperoleh dengan cara membentuk Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih berdasarkan daftar umur Dana Bergulir sebagai berikut:

No	Umur Dana Bergulir	Kualitas	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1.	<1 Tahun	Lancar	0,5%
2.	1-3 Tahun	Kurang Lancar	10%
3.	>3-5 Tahun	Diragukan	50%
4.	>5 Tahun	Macet	100%

b. Aset Tetap



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

- 1) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan nilai perolehan memenuhi minimum kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah sama dengan atau lebih dari **Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**;
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**; dan
 - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 2) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 3) Saat pengakuan aset, akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 4) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 5) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- 6) Sedangkan, nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 8) Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi diskon dan rabat; dan
 - b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset:

- i. Biaya persiapan tempat;
 - ii. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - iii. Biaya pemasangan (*installation cost*);
 - iv. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
 - v. Biaya konstruksi; dan
 - vi. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*).
Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.
- c) Demikian juga pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

aset lainnya. Hal tersebut meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (*software*), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Meskipun demikian, harus diperhatikan nilai kewajarannya dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

- 9) Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
- a) Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
 - b) Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
 - c) Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
 - d) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - i. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - bertambah masa manfaat, dan/atau
 - bertambah kapasitas, dan/atau
 - bertambah kualitas, dan/atau
 - bertambah volume.
 - ii. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

10) Penyajian Aset Tetap

- a) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- b) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{(N \quad y \quad d \quad d)}{(M \quad m \quad)}$$

Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu)

- c) Penyusutan dilakukan dengan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh tanpa memperhatikan waktu perolehan aset tetap. Sehingga meskipun aset tetap baru diperoleh selama 1 (satu) hari, penyusutan tetap dilakukan setahun penuh.
- d) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- e) Penyusutan tidak dilakukan terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

c. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- 2) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- 3) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

4) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

d. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran;
 - b) Tuntutan Ganti Rugi;
 - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - d) Aset Tak Berwujud; dan
 - e) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

B. Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban terdiri dari:

1. Kewajiban Jangka Pendek

adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

daerah kepada pihak lain. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

2. Kewajiban Jangka Panjang

adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C. Ekuitas

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Pendapatan - LRA

1. Pendapatan- LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah, rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional, dan rekening BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
2. Pendapatan - LRA diakui pada saat:
 - a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening Bendahara JKN pada FKTP.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

- d. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- f. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan

E. Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat:
 - a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - b. Belanja yang berasal dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional diakui pada saat diterbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh PPKD.
 - c. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
 - d. Pengakuan belanja Badan Layanan Umum mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

F. Transfer

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- c. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara BLUD, dan Bendahara JKN pada FKTP yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

G. Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
2. Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

4. Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

H. Pendapatan - LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
3. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.
4. Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah Pajak Daerah-LO yang bersifat *official assessment* yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Sedangkan Pendapatan-LO atas pajak-pajak lainnya diakui bersamaan dengan pengakuan Pendapatan-LRA yaitu ketika kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau RKUD.
5. Sedangkan Pendapatan Retribusi-LO yang diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO).

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

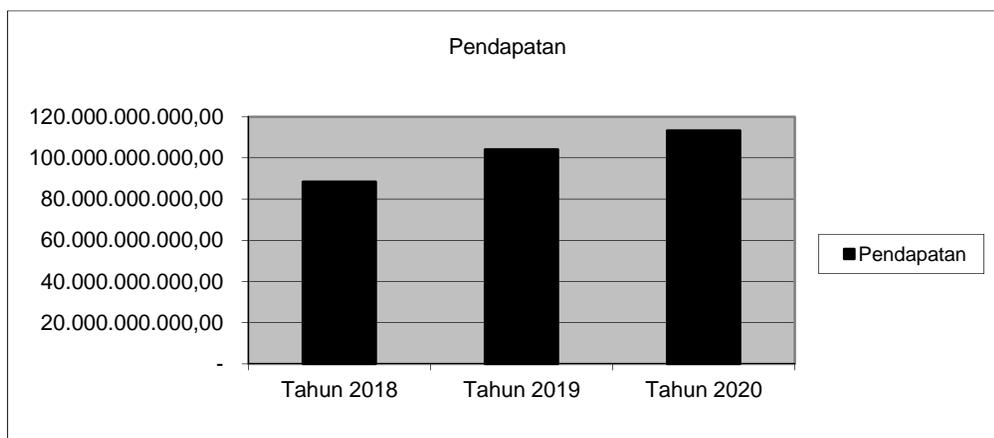
Realisasi Pendapatan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp.113.351.405.492,00 atau mencapai 141,69% dari target sebesar Rp.80.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Lain-lain



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan BLUD.

Realisasi Pendapatan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.9.189.863.775,00 atau naik 8,82% dari realisasi tahun 2019. Perkembangan realisasi Pendapatan tahun 2018-2020 terlihat pada grafik di bawah.



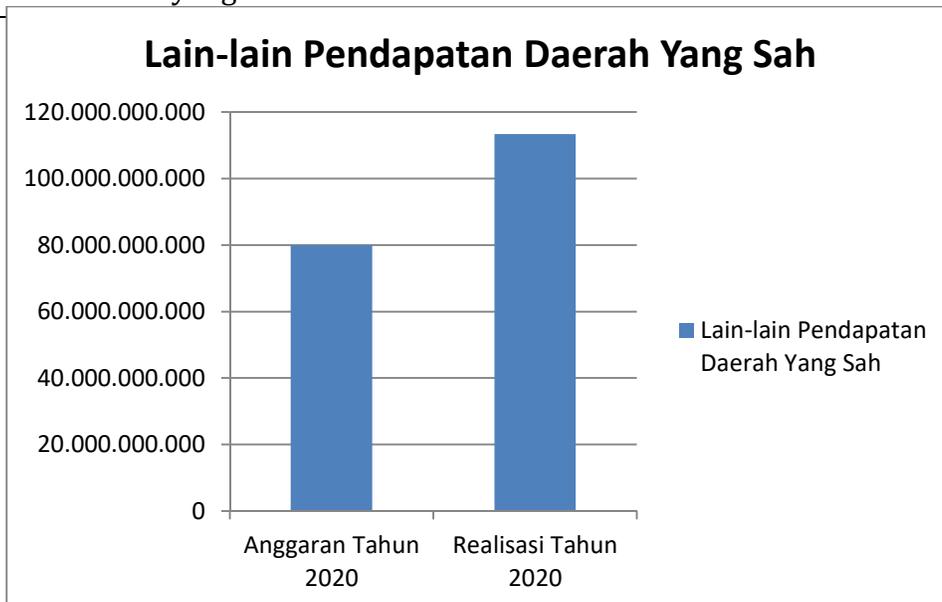
Grafik. Perkembangan Realisasi Pendapatan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Tahun 2018-2020

Realisasi Belanja RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp.129.012.639.486,00 atau mencapai 100,58% dari anggaran sebesar Rp.128.271.022.000,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.114.384.934.108,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.14.627.705.378,00.

Realisasi Belanja tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.16.576.046.823,00 atau turun 11,39% dari realisasi tahun 2019. Perkembangan realisasi Belanja tahun 2018-2020 terlihat pada grafik di bawah.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020



Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi Pendapatan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp.9.189.863.775,00 atau naik 8,82% dari realisasi tahun 2019, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	2020		2019	Kenaikan/ (Penurunan)	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	(Rp)	(%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	80.000.000.000,00	113.351.405.492,00	104.161.541.717,00	9.189.863.775,00	8,82%
Jasa Pelayanan	78.600.000.000,00	111.289.565.960,00	102.216.210.529,00	9.073.355.431,00	8,88%
Hasil Kerjasama	400.000.000,00	262.367.852,00	527.321.911,00	-264.954.059,00	-50,25%
Pendapatan Lain yang Sah	1.000.000.000,00	1.799.471.680,00	1.418.009.277,00	381.462.403,00	26,90%

Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga berdasarkan Realisasi tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut:



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Data sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah RSUD dr. R.
Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2020

No.	Sumber Pendapatan BLUD	2020
I	Pendapatan Jasa Layanan:	
1	Pelayanan Pasien Umum/lur Biaya	11.130.452.258,00
2	BPJS Kesehatan	77.648.652.792,00
3	Klaim Covid 19	20.775.377.100,00
4	PT. Asuransi Inhealth	14.558.299,00
5	Jasa Raharja	521.007.162,00
6	Yakes Telkom	63.366.237,00
7	Jamkesda Banjarnegara	86.129.126,00
8	Jaminan Kecelakaan Kerja	64.808.291,00
9	Panti Nugroho	7.153.100,00
10	GFTB Dinkes Prov. Jateng	73.525.778,00
11	Klaim PT.KAI	8.767.911,00
12	Klaim Jampersal	876.355.606,00
13	Pelayanan GCU	19.412.300,00
II	Hasil Kerja Sama :	
1	MOU Institusi Pendidikan/Diklat	135.001.500,00
2	Parkir	18.857.552,00
3	Perjanjian (Sewa)	111.382.469,00
III	Pendapatan Lain-lain BLUD yang sah:	
1	Bunga Bank (Giro/Deposito)	781.540.214,00
2	Listrik perumahan paramedis, dll	1.015.057.797,00
	Jumlah	113.351.405.492,00

B. BELANJA **Rp.129.012.639.486,00**

Realisasi Belanja RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp.129.012.639.486,00 atau mencapai 100,58% dari anggaran sebesar Rp.128.271.022.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2019, angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp.16.576.046.823,00 atau turun 11,39%.

Belanja Pemerintah Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Jenis Belanja)

Berdasarkan jenis, realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.114.384.934.108,00 (100,83%) dan Belanja Modal sebesar Rp.14.627.705.378,00 (98,68%).



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

URAIAN	2020		2019	Kenaikan/ (Penurunan)	
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI	(Rp)	(%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Belanja Pegawai	34.322.975.000,00	33.941.937.044,00	32.740.633.590,00	1.201.303.454,00	3,67%
Belanja Barang dan Jasa	79.124.060.000,00	80.442.997.064,00	91.574.097.289,00	-11.131.100.225,00	-12,16%
Jumlah	113.447.035.000,00	114.384.934.108,00	124.314.730.879,00	-9.929.796.771,00	-7,99%

a. Belanja Pegawai Rp.33.941.937.044,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.33.941.937.044,00 atau 98,89% dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp.34.322.975.000,00. Jumlah Belanja Pegawai tersebut merupakan 26,31% dari total Belanja RSUD. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2020 dirinci sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi		Kenaikan / Penurunan	
	2020	2020	2019	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Belanja Gaji dan Tunjangan (APBD)	27.174.685.000,00	26.885.565.294,00	25.447.879.440,00	1.437.685.854,00	5,65%
Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	20.293.195.000,00	20.153.640.400,00	19.499.078.352,00	654.562.048,00	3,36%
Belanja Tunjangan Keluarga	1.872.268.000,00	1.865.417.326,00	1.816.127.866,00	49.289.460,00	2,71%
Belanja Tunjangan Jabatan	140.976.000,00	136.590.000,00	127.900.000,00	8.690.000,00	6,79%
Belanja Tunjangan Fungsional	2.056.158.000,00	2.058.278.000,00	1.847.455.000,00	210.823.000,00	11,41%
Belanja Tunjangan Fungsional Umum	381.871.000,00	377.195.000,00	360.275.000,00	16.920.000,00	4,70%
Belanja Tunjangan Beras	1.039.306.000,00	1.029.595.140,00	1.028.001.900,00	1.593.240,00	0,15%
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	81.483.000,00	82.697.865,00	59.361.120,00	23.336.745,00	39,31%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Belanja Pembulatan Gaji	273.000,00	267.587,00	300.806,00	- 33.219,00	-11,04%
Belanja Jaminan Kesehatan	1.142.039.000,00	1.016.080.413,00	548.912.815,00	467.167.598,00	85,11%
Belanja Jaminan Kematian	125.337.000,00	124.353.536,00	120.348.550,00	4.004.986,00	3,33%
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	41.779.000,00	41.450.027,00	40.118.031,00	1.331.996,00	3,32%
Belanja Pegawai BLUD					
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.517.365.500,00	6.509.305.500,00	6.560.972.650,00	- 51.667.150,00	-0,79%
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.397.965.500,00	6.389.905.500,00	6.445.022.650,00	- 55.117.150,00	-0,86%
Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	119.400.000,00	119.400.000,00	115.950.000,00	3.450.000,00	2,98%
Belanja Uang Lembur	31.329.000,00	26.575.000,00	165.936.000,00	- 139.361.000,00	-83,98%
Belanja Uang Lembur PNS	19.704.000,00	18.347.000,00	106.123.500,00	- 87.776.500,00	-82,71%
Belanja Uang Lembur Non PNS	11.625.000,00	8.228.000,00	59.812.500,00	- 51.584.500,00	-86,24%
Honorarium PNS	517.147.500,00	450.455.750,00	557.995.500,00	- 107.539.750,00	-19,27%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	189.112.500,00	154.045.750,00	209.912.500,00	- 55.866.750,00	-26,61%
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	21.700.000,00	18.900.000,00	21.700.000,00	- 2.800.000,00	-12,90%
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	25.525.000,00	22.900.000,00	23.650.000,00	- 750.000,00	-3,17%
Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	280.810.000,00	254.610.000,00	302.733.000,00	- 48.123.000,00	-15,90%
Honorarium Non PNS	82.448.000,00	70.035.500,00	7.850.000,00	62.185.500,00	792,17%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.448.000,00	70.035.500,00	7.850.000,00	62.185.500,00	792,17%
Total Belanja Pegawai	34.322.975.000,00	33.941.937.044,00	32.740.633.590,00	1.201.303.454,00	3,67%

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun 2019, angka tersebut diatas mengalami peningkatan sebesar Rp.1.201.303.454,00 atau naik 3,67%.

Realisasi belanja terbesar untuk kelompok Belanja Pegawai Tahun 2020 yang berasal dari dana BLUD yaitu Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dengan jumlah Rp.6.389.905.500,00.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp.55.117.150,00 atau turun 0,86% dari realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar Rp.6.445.022.650,00. Sedangkan yang berasal dari dana APBD Tahun 2020 realisasi belanja terbesar yaitu Belanja Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi dengan jumlah Rp.20.153.640.400,00. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp.654.562.048,00 atau naik 3,36% dari realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar Rp.19.499.078.352,00.

b. Belanja Barang dan Jasa _____Rp.80.442.997.064,00

Realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar Rp.80.442.997.064,00 atau 101,67% dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp.79.124.060.000,00. Jumlah Belanja Barang/Jasa tersebut merupakan 62,35% dari total Belanja RSUD tahun 2020. Rincian Belanja Barang/Jasa tahun 2020 sebagai berikut.

Uraian	Anggaran	Realisasi		Kenaikan / Penurunan	
	2020	2020	2019	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Subsidi Pembelian Obat-obatan RSUD sebagai Pengganti Pelayanan Kesehatan kepada Masy. Miskin	2.500.000.000,00	2.499.977.276,00	7.499.659.508,00	-4.999.682.232,00	-66,67%
Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	2.499.977.276,00	7.499.659.508,00	-4.999.682.232,00	-66,67%
Belanja Bahan Pakai Habis	1.845.548.500,00	1.753.807.368,00	1.496.086.555,00	257.720.813,00	17,23%
Belanja Alat Tulis Kantor	598.726.000,00	559.554.328,00	566.744.504,00	- 7.190.176,00	-1,27%
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	67.365.000,00	64.876.100,00	78.790.650,00	- 13.914.550,00	-17,66%
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	8.750.000,00	8.626.000,00	6.168.000,00	2.458.000,00	39,85%
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	578.398.500,00	537.225.796,00	451.932.152,00	85.293.644,00	18,87%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	74.880.000,00	70.922.100,00	105.195.681,00	- 34.273.581,00	-32,58%
Belanja Pengisian Tabung Gas	189.900.000,00	185.222.000,00	219.100.000,00	- 33.878.000,00	-15,46%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur	5.000.000,00	4.994.500,00	70.000,00	4.924.500,00	7035,0%
Belanja Perlengkapan Rumah Tangga	322.529.000,00	322.386.544,00	68.085.568,00	254.300.976,00	373,50%
Belanja Bahan/Material	25.376.776.000,00	25.258.725.529,00	25.217.141.238,00	41.584.291,00	0,16%
Belanja Bahan obat-obatan	14.610.645.000,00	14.601.373.659,00	12.263.148.137,00	2.338.225.522,00	19,07%
Belanja Bahan Pelayanan Kesehatan	7.600.753.000,00	7.543.827.317,00	8.939.986.971,00	-1.396.159.654,00	-15,62%
Belanja Bahan Laboratorium	3.165.378.000,00	3.113.524.553,00	4.014.006.130,00	- 900.481.577,00	-22,43%
Belanja Jasa Kantor	41.268.130.000,00	43.030.719.569,00	48.744.931.362,00	- 5.714.211.793,00	-11,72%
Belanja Telepon	19.200.000,00	15.607.258,00	21.935.315,00	- 6.328.057,00	-28,85%
Belanja Air	292.800.000,00	286.269.080,00	297.761.620,00	- 11.492.540,00	-3,86%
Belanja Listrik	1.198.804.000,00	1.192.053.339,00	1.216.626.768,00	- 24.573.429,00	-2,02%
Belanja Surat Kabar / Majalah	12.423.000,00	9.037.000,00	15.805.400,00	- 6.768.400,00	-42,82%
Belanja Kawat/Faksimili/Internet	57.600.000,00	52.461.871,00	51.209.490,00	1.252.381,00	2,45%
Belanja Paket/Pengiriman	3.125.000,00	2.719.000,00	2.892.400,00	- 173.400,00	-6,00%
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	53.500.000,00	29.548.140,00	33.608.380,00	- 4.060.240,00	-12,08%
Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.278.700.000,00	1.271.531.703,00	1.148.819.952,00	122.711.751,00	10,68%
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	38.224.388.000,00	40.060.111.678,00	45.749.274.311,00	- 5.689.162.633,00	-12,44%
Belanja Jasa Publikasi	107.790.000,00	99.751.000,00	175.215.726,00	- 75.464.726,00	-43,07%
Belanja Jasa Akomodasi	11.800.000,00	9.989.000,00	25.502.000,00	- 15.513.000,00	-60,83%
Belanja Jasa Dekorasi	8.000.000,00	1.640.500,00	6.280.000,00	- 4.639.500,00	-73,88%
Belanja Premi Asuransi	211.980.000,00	156.039.263,00	101.289.645,00	54.749.618,00	54,05%
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	50.248.000,00	45.158.708,00		45.158.708,00	-
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	8.229.000,00	8.227.925,00	7.945.645,00	282.280,00	3,55%
Belanja Premi Asuransi Tanggung Gugat	96.725.000,00	96.722.000,00	93.344.000,00	3.378.000,00	3,62%
Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	25.236.000,00	2.635.564,00		2.635.564,00	-
Belanja Premi Asuransi Kematian	31.542.000,00	3.295.066,00		3.295.066,00	-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	92.755.700,00	80.102.466,00	117.834.125,00	- 37.731.659,00	-32,02%
Belanja Jasa Service	20.450.000,00	12.734.680,00	15.809.400,00	- 3.074.720,00	-19,45%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Belanja Penggantian Suku Cadang	45.805.700,00	42.988.500,00	80.276.500,00	- 37.288.000,00	-46,45%
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	19.000.000,00	18.659.061,00	16.304.050,00	2.355.011,00	14,44%
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	7.500.000,00	5.720.225,00	5.444.175,00	276.050,00	5,07%
Belanja Cetak dan Penggandaan	575.263.500,00	562.437.900,00	698.410.150,00	- 135.972.250,00	-19,47%
Belanja Cetak	493.263.500,00	493.247.200,00	598.447.000,00	- 105.199.800,00	-17,58%
Belanja Penggandaan	82.000.000,00	69.190.700,00	99.963.150,00	- 30.772.450,00	-30,78%
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	72.450.000,00	67.857.375,00	54.442.532,00	13.414.843,00	24,64%
Belanja Sewa Peralatan Praktek	10.000.000,00	6.325.000,00	400.000,00	5.925.000,00	1481,25%
Belanja Sewa Peralatan Lainnya	62.450.000,00	61.532.375,00	54.042.532,00	7.489.843,00	13,86%
Belanja Makanan dan Minuman	2.931.407.000,00	2.886.400.635,00	3.269.372.932,00	- 382.972.297,00	-11,71%
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.420.000.000,00	1.401.619.205,00	1.381.705.680,00	19.913.525,00	1,44%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.862.500,00	115.013.700,00	207.819.890,00	- 92.806.190,00	-44,66%
Belanja Makanan dan Minuman Tamu	83.654.500,00	66.859.000,00	12.209.800,00	54.649.200,00	447,58%
Belanja Makanan dan Minuman Pasien	1.308.890.000,00	1.302.908.730,00	1.667.637.562,00	- 364.728.832,00	-21,87%
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	68.026.600,00	61.708.000,00	1.025.000,00	60.683.000,00	5920,29%
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	68.026.600,00	61.708.000,00	1.025.000,00	60.683.000,00	5920,29%
Belanja Pakaian Kerja	132.128.400,00	123.623.900,00	19.347.375,00	104.276.525,00	538,97%
Belanja Pakaian Kerja Lapangan	132.128.400,00	123.623.900,00	19.347.375,00	104.276.525,00	538,97%
Belanja Perjalanan Dinas	128.500.000,00	101.023.500,00	260.602.330,00	- 159.578.830,00	-61,23%
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	8.745.000,00	19.505.000,00	- 10.760.000,00	-55,17%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.500.000,00	92.278.500,00	241.097.330,00	- 148.818.830,00	-61,73%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi		Kenaikan / Penurunan	
	2020	2020	2019	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.654.170.000,00	12.024.825.562,00	1.492.839.496,00	10.531.986.066,00	705,50%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.269.817.000,00	1.255.748.816,00	19.342.465.934,00	- 18.086.717.118,00	-93,51%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.900.000.000,00	1.347.131.000,00	438.650.000,00	908.481.000,00	207,11%
Jumlah	14.823.987.000,00	14.627.705.378,00	21.273.955.430,00	- 6.646.250.052,00	-31,24%

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin _____ Rp.12.024.825.562,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp.12.024.825.562,00 atau 103,18% dari anggaran yang telah ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp.11.654.170.000,00.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebagai berikut:

Uraian	Realisasi		Kenaikan / Penurunan	
	2020	2019	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	58.220.000,00	14.212.000,00	44.008.000,00	309,65%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	58.220.000,00	14.212.000,00	44.008.000,00	309,65%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel tak Bermesin	-	14.648.172,00	- 14.648.172,00	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang besi	-	14.648.172,00	- 14.648.172,00	-100,00%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	4.575.000,00	-	4.575.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	4.575.000,00	-	4.575.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	46.919.800,00	25.363.982,00	21.555.818,00	84,99%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	46.919.800,00	25.363.982,00	21.555.818,00	84,99%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	560.806.318,00	439.957.775,00	120.848.543,00	27,47%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	392.551.818,00	257.079.125,00	135.472.693,00	52,70%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	-	3.808.550,00	- 3.808.550,00	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	35.586.000,00	164.884.500,00	- 129.298.500,00	-78,42%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	-	5.708.000,00	- 5.708.000,00	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	132.668.500,00	8.477.600,00	124.190.900,00	1464,93%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	239.652.500,00	190.551.500,00	49.101.000,00	25,77%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	8.850.000,00	-	8.850.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	124.070.000,00	146.903.500,00	- 22.833.500,00	-15,54%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	106.732.500,00	43.648.000,00	63.084.500,00	144,53%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	5.202.000,00	6.384.000,00	- 1.182.000,00	-18,52%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	5.202.000,00	6.384.000,00	- 1.182.000,00	-18,52%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	11.087.241.185,00	792.482.069,00	10.294.759.116,00	1299,05%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.283.305.264,00	96.066.800,00	2.187.238.464,00	2276,79%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	10.840.500,00	12.369.088,00	- 1.528.588,00	-12,36%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran THT	-	475.142.781,00	- 475.142.781,00	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	8.497.522.136,00	205.048.400,00	8.292.473.736,00	4044,15%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	1.980.000,00	555.000,00	1.425.000,00	256,76%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	152.243.285,00	-	152.243.285,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi	141.350.000,00	3.300.000,00	138.050.000,00	4183,33%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	19.308.759,00	9.239.998,00	10.068.761,00	108,97%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	-	9.239.998,00	- 9.239.998,00	-100,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	3.100.000,00	-	3.100.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Patologi	9.311.759,00	-	9.311.759,00	



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A	6.897.000,00	-	6.897.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	2.900.000,00	-	2.900.000,00	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	2.900.000,00	-	2.900.000,00	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.024.825.562,00	1.492.839.496,00	10.531.986.066,00	705,50%

Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar Rp.10.531.986.066,00 atau naik 705,50% dibandingkan realisasi tahun 2019 yang hanya sebesar Rp.1.492.839.496,00. Salah satu yang menyebabkan peningkatan realisasi belanja modal peralatan dan mesin diantaranya adalah realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran yang berjumlah Rp.11.087.241.185,00 atau meningkat sebesar Rp.10.294.759.116,00 atau naik 1299,05% dibanding tahun sebelumnya yang hanya sejumlah Rp.792.482.069,00 pada Tahun 2019.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin ini menjadi penyumbang angka terbesar yaitu sebesar 82,21% dari total belanja Modal Rumah Sakit pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.12.024.825.562,00

Peningkatan ini terjadi karena Rumah Sakit mendapatkan Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan yaitu berupa Belanja Modal Alat Kedokteran Umum dan Alat Kedokteran Bedah di Tahun 2020.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan _____ Rp.1.255.748.816,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan di Tahun 2020 sebesar Rp.1.255.748.816,00 atau 98,89% dari anggaran yang telah ditetapkan di tahun 2020 sebesar Rp.1.269.817.000,00.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Jumlah belanja modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp.18.086.717.118,00 atau turun 93,51% dibandingkan realisasi tahun 2019, sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan / Penurunan	
	2020	2019	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Modal Gedung dan Bangunan				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.255.748.816,00	19.342.465.934,00	- 18.086.717.118,00	-93,51%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	341.500.000,00	76.400.000,00	265.100.000,00	346,99%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	714.675.816,00	-	714.675.816,00	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	199.573.000,00	19.266.065.934,00	- 19.066.492.934,00	-98,96%
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.255.748.816,00	19.342.465.934,00	- 18.086.717.118,00	-93,51%

c. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan___Rp.1.347.131.000,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan di Tahun 2020 sebesar Rp.1.347.131.000,00 atau 70,90% dari Anggaran yang telah ditetapkan di Tahun 2020 sebesar Rp.1.900.000.000,00.

Jumlah belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan mengalami kenaikan sebesar Rp.908.481.000,00 atau naik 207,11% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan / Penurunan	
	2020	2019	(Rp)	%
	(Rp)	(Rp)		
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	1.347.131.000,00	95.000.000,00	1.252.131.000,00	1318,03%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	-	95.000.000,00	- 95.000.000,00	-100,00%
---	---	---------------	-----------------	----------

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	1.347.131.000,00	-	1.347.131.000,00	
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Gas	-	343.650.000,00	- 343.650.000,00	-100,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi	-	343.650.000,00	- 343.650.000,00	-100,00%
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.347.131.000,00	438.650.000,00	908.481.000,00	207,11%

5.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

A. Saldo Anggaran Lebih Awal _____ Rp.7.641.354.291,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah sebesar Rp.7.641.354.291,00. Saldo ini merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2019.

B. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan __ Rp.7.641.354.291,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) awal Tahun 2020 adalah sebesar Rp.7.641.354.291,00.

Dari Saldo SAL awal tahun 2020 tersebut, jumlah yang direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun 2020 lebih besar yaitu sebesar Rp.7.641.355.000,00 sehingga terdapat selisih pembulatan sebesar Rp.709,00. Saldo SAL tersebut digunakan di Perubahan Anggaran Tahun 2020 atas rekomendasi dari Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

C. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran _____ Rp.32.164.210.771,00

SiLPA tahun 2020 merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Dengan adanya defisit anggaran Tahun 2020 sebesar Rp.1.187.194.012,00 pembulatan penggunaan SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp.709,00 dan pelampauan pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp.33.351.405.492,00 maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2020 sebesar Rp.32.164.210.771,00.

Nilai SiLPA tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp.24.522.856.480,00 atau naik 320,92% , kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2019 yang hanya sebesar Rp.7.641.354.291,00

D. Saldo Anggaran Lebih Akhir (SAL) Akhir _____ Rp.
32.164.210.771,00

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp.32.164.210.771,00 yang berasal dari SAL awal Rp.7.641.354.291,00 dikurangi dengan penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp.7.641.354.291,00 ditambah dengan SiLPA Tahun 2020 sebesar Rp.32.164.210.771,00.

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.3.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Secara ringkas, posisi keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Aset Lancar	47.507.699.385,75	41.851.273.359,60	5.656.426.026,15	13,52%
Aset Tetap	92.376.079.552,82	89.826.930.904,73	2.549.148.648,09	2,84%
Aset Lainnya	58.890.130,40	278.548.082,80	-219.657.952,40	-78,86%
JUMLAH ASET	139.942.669.068,97	131.956.752.347,13	7.985.916.721,84	6,05%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	126.103.518,00	144.709.926,00	-18.606.408,00	-12,86%
Pendapatan Diterima Dimuka	72.826.667,00	76.250.000,00	-3.423.333,00	-4,49%
Utang Belanja	5.962.830.423,00	6.380.031.993,00	-417.201.570,00	-6,54%
Utang Jangka Pendek Lainnya				
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.161.760.608,00	6.600.991.919,00	-439.231.311,00	-6,65%
JUMLAH KEWAJIBAN	6.161.760.608,00	6.600.991.919,00	-439.231.311,00	-6,65%
EKUITAS				
EKUITAS	133.780.908.460,97	125.355.760.428,13	8.425.148.032,84	6,72%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	139.942.669.068,97	131.956.752.347,13	7.985.916.721,84	6,05%

Dalam periode 3 tahun terakhir, posisi keuangan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga menunjukkan trend yang cukup baik. Terlihat dari posisi aset yang kembali meningkat di Tahun 2020 sebesar Rp.7.985.916.721,84 atau naik 6,05% dari Tahun sebelumnya, peningkatan Aset tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah ekuitas sebesar Rp.8.425.148.032,84 atau naik 6,72% dari Tahun 2019 dan penurunan kewajiban sebesar 6,65% atau turun sejumlah Rp.439.231.311,00 sebagaimana grafik berikut ini.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa kenaikan terjadi pada Aset Lancar dan Aset Tetap dengan peningkatan masing-masing sebesar 13,52% atau sebesar Rp.5.656.426.026,15 pada Aset Lancar dan 2,84% atau sebesar Rp.2.549.148.648,09 pada Aset Tetap. Sedangkan penurunan terjadi pada Aset Lainnya sebesar Rp.219.657.952,40 atau turun 78,86%.

Komposisi Aset RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.



1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp.47.507.699.385,75 mengalami peningkatan sebesar Rp.5.656.426.026,15 atau naik 13,52% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019.

Jumlah Aset Lancar tersebut terdiri dari:

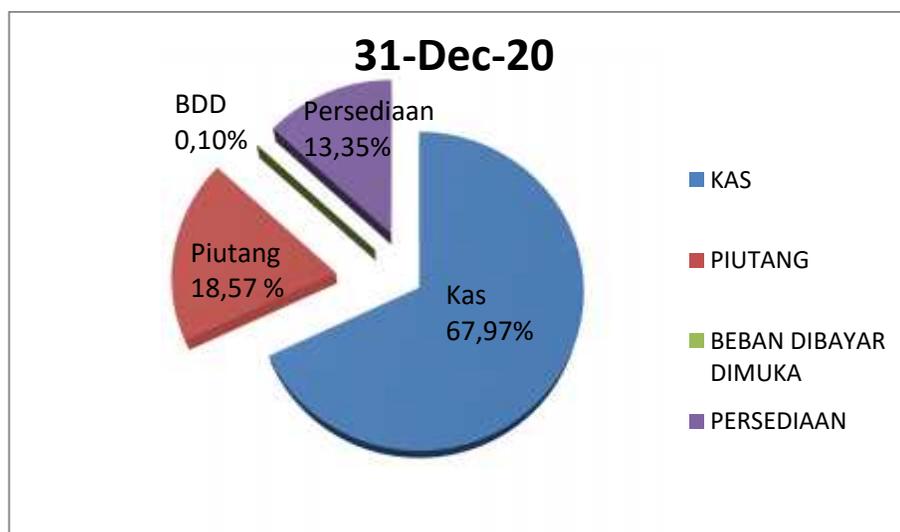


Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Kas	32.290.314.289,00	7.786.064.217,00	24.504.250.072,00	314,72%
Piutang Pendapatan	10.049.337.340,00	30.063.772.672,00	(20.014.435.332,00)	-66,57%
Penyisihan Piutang	(1.225.922.297,25)	(1.113.772.642,40)	(112.149.654,85)	10,07%
Beban Dibayar Dimuka	49.732.321,00	47.996.274,00	1.736.047,00	3,62%
Persediaan	6.344.237.733,00	5.067.212.839,00	1.277.024.894,00	25,20%
Jumlah Aset Lancar	47.507.699.385,75	41.851.273.359,60	5.656.426.026,15	13,52%

Tabel di atas menunjukkan bahwa Piutang Pendapatan mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020, turun hingga 66,57% atau sebesar Rp.20.014.435.332,00 sedangkan Kas, Beban dibayar dimuka dan Persediaan mengalami peningkatan di bandingkan tahun 2019. Peningkatan Kas menjadi yang terbesar hingga 314,72% atau sejumlah Rp.24.504.250.072,00

Komposisi Aset Lancar RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2020 sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.



Grafik di atas menunjukkan bahwa kondisi keuangan RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga akhir tahun 2020 sangat liquid di sektor Kas.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

a. Kas _____ **Rp.32.290.314.289,00**

Saldo Kas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.32.290.314.289,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.24.504.250.072,00 atau naik 314,72% dari saldo Kas per 31 Desember 2019.

Saldo Kas tersebut merupakan Saldo Kas BLUD sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Kas _____ **di**
BLUD _____ **Rp.32.290.314.289,00**

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp.32.290.314.289,00 merupakan jumlah Pendapatan BLUD yang masih tersimpan di rekening Bank BLUD dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	No. Rekening	Saldo 31/12/2020
			(Rp)
1	Bank Jateng	1-027-00250-8	31.274.904.602,00
2	BCA	0970999779	194.342.758,00
3	BNI	0883966669	81.366.919,00
4	BRI	007401001132308	605.369.548,00
5	Mandiri	180-00-0123749-6	134.330.462,00
Jumlah			32.290.314.289,00

Pada tabel di atas terlihat bahwa Bank BLUD RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata Purbalingga terdiri dari 5 (lima) Bank yang berbeda yaitu Bank Jateng, BCA, BNI, BRI dan Bank Mandiri.

Sampai dengan 31 Desember 2020 Saldo Kas BLUD sebesar Rp.32.290.314.289,00 terdiri dari saldo Kas BLUD sebesar Rp.32.164.210.771,00 dan Saldo Jaminan Pemeliharaan Pihak Ketiga Tahun 2020 yaitu sebesar Rp.47.695.025,00 serta potongan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan pegawai tidak tetap RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga bulan Desember 2020 yang belum disetorkan ke Bank BRI sebesar Rp.78.408.493,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Uraian	Piutang awal	masuk	keluar	Piutang Akhir
Piutang Pasien	1.388.004.064,00	29.000.393,00	554.712,00	1.416.449.745,00
Piutang Jasa Pelayanan BLUD	28.612.520.608,00	8.560.839.350,00	28.593.637.063,00	8.579.722.895,00
Piutang Pendapatan Kerjasama BLUD	63.248.000,00	28.356.700,00	38.440.000,00	53.164.700,00
Jumlah	30.063.772.672,00	8.618.196.443,00	28.632.631.775,00	10.049.337.340,00

(a) Piutang Pasien

Piutang Pasien per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.416.449.745,00 merupakan saldo Piutang RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata kepada pasien yang timbul karena ketidakmampuan pasien untuk membayar biaya perawatan, baik sebagian maupun keseluruhan.

Jumlah Piutang Pasien tersebut terdiri dari akumulasi saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.388.004.064,00 ditambah dengan piutang pasien Tahun 2020 sebesar Rp.29.000.393,00 dan pelunasan piutang Pasien Tahun 2019 sebesar Rp.554.712,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

URAIAN	31-Dec-19	masuk	keluar	Piutang Akhir
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Pasien Tahun 2020	-	29.000.393,00	-	29.000.393,00
Piutang Pasien Tahun 2019	63.345.074,00	-	554.712,00	62.790.362,00
Piutang Pasien Tahun 2018	49.835.573,00	-	-	49.835.573,00
Piutang Pasien Tahun 2017	99.182.714,00	-	-	99.182.714,00
Piutang Pasien Tahun 2016	193.991.893,00	-	-	193.991.893,00
Piutang Pasien Tahun <2015	981.648.810,00	-	-	981.648.810,00
Total piutang	1.388.004.064,00	29.000.393,00	554.712,00	1.416.449.745,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

b) Piutang Jasa Pelayanan BLUD

Saldo Piutang Klaim Asuransi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.8.579.722.895,00 merupakan piutang kepada pengelola asuransi kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pelunasannya oleh RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata.

Jumlah Piutang tersebut terdiri dari akumulasi saldo piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp.28.612.520.608,00 ditambah dengan piutang Klaim Asuransi Tahun 2020 sebesar Rp.8.560.839.350,00 dan pelunasan piutang Klaim Asuransi Tahun 2019 sebesar Rp.28.593.637.063,00 sebagaimana mutasi Piutang berikut :

URAIAN	31-Dec-19	masuk	keluar	Piutang Akhir
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang BPJS Kesehatan	28.481.130.194,00	7.984.142.781,00	28.466.842.608,00	7.998.430.367,00
Piutang Yakes Telkom	14.582.300,00	9.422.615,00	14.582.300,00	9.422.615,00
Piutang Jasa Raharja	43.810.543,00	438.249.922,00	40.334.630,00	441.725.835,00
Piutang InHealth	3.480.201,00	826.051,00	3.480.201,00	826.051,00
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	23.792.498,00	2.047.835,00	23.072.452,00	2.767.881,00
Piutang TB-MDR	34.418.068,00	104.466.628,00	34.018.068,00	104.866.628,00
Piutang PT.KAI Persero	565.480,00	192.748,00	565.480,00	192.748,00
Piutang Jamkesda Banjarnegara	10.741.324,00	21.490.770,00	10.741.324,00	21.490.770,00
Total piutang	28.612.520.608,00	8.560.839.350,00	28.593.637.063,00	8.579.722.895,00

c) Piutang Pendapatan Kerjasama BLUD

Saldo Piutang Pendapatan Kerjasama BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp.53.164.700,00 merupakan piutang kerjasama baik dengan Institusi Pendidikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Mahasiswa maupun sewa menyewa dengan pihak



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

luar Rumah Sakit dan juga kerjasama lainnya sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	31-Dec-19	masuk	keluar	Piutang Akhir
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Piutang Pendapatan Diklat Praktek	1.440.000,00	13.325.000,00	1.440.000,00	13.325.000,00
Piutang Pendapatan Diklat MOU	10.808.000,00	13.750.000,00	8.000.000,00	16.558.000,00
Piutang Pendapatan Sewa Lapak PKL	51.000.000,00		29.000.000,00	22.000.000,00
Piutang Pendapatan Jasa antar obat		166.300,00		166.300,00
Piutang Pendapatan Jasa Pembuatan Kartu ID Pasien		1.115.400,00		1.115.400,00
Total piutang	63.248.000,00	28.356.700,00	38.440.000,00	53.164.700,00

Secara lengkap, rincian Piutang dapat dilihat pada Lampiran IV Daftar Rincian Piutang Per 31 Desember 2020.

c. Penyisihan Piutang Pendapatan (Rp.1.225.922.297,25)

Jumlah Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.225.922.297,25 mengalami peningkatan sebesar Rp.112.149.654,85 atau naik 10,07% dari saldo Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 seperti tampak pada tabel berikut :

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Penyisihan Piutang Pendapatan	-1.225.922.297,25	-1.113.772.642,40	-112.149.654,85	10,07%

Penyisihan Piutang ini merupakan Penyisihan Piutang Pendapatan yang sampai Tahun 2020 belum terealisasi pelunasannya dan sebagian besar merupakan Angka Piutang Pasien. Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan sebagaimana terdapat pada Lampiran V Tabel Penyisihan Piutang Tidak tertagih Per 31 Desember 2020.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

d. Beban Dibayar Dimuka _____ Rp.49.732.321,00

Jumlah Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp.49.732.321,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.736.047,00 atau naik 3,62% dari saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.371.321,00	1.324.274,00	47.047,00	3,55%
Beban Premi Asuransi Tanggung Gugat	48.361.000,00	46.672.000,00	1.689.000,00	3,62%
Jumlah	49.732.321,00	47.996.274,00	1.736.047,00	3,62%

Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah merupakan biaya premi asuransi kendaraan dinas yang dibayarkan kepada PT.Asuransi Bumiputera Muda pada Triwulan pertama tahun 2020 dan masa aktif jatuh tempo asuransi adalah selama setahun hingga Triwulan pertama tahun 2021.

Sedangkan Premi Asuransi Tanggung Gugat merupakan biaya premi asuransi Tanggung Gugat Dokter yang dibayarkan kepada PT. Asuransi Bumiputera Muda pada Triwulan kedua tahun 2020 dan masa aktif jatuh tempo asuransi adalah selama setahun hingga Triwulan kedua tahun 2021.

Secara rinci Beban Dibayar Di Muka dapat dilihat pada lampiran VI Daftar Beban Dibayar Di Muka Per 31 Desember 2020.

e. Persediaan _____ Rp.6.344.237.733,00

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.6.344.237.733,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.277.024.894,00 atau naik 25,20% dari saldo persediaan per 31 Desember 2019, yang terdiri dari Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi, Bahan Kimia, Bahan Lainnya, Suku Cadang Alat Kedokteran, Suku Cadang Alat Laboratorium, Alat Tulis Kantor,



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Nilai Aset Tetap RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga per 31 Desember 2020 sebesar Rp.92.376.079.552,82 bertambah Rp.2.549.148.648,09 atau naik 2,84% dari posisi per 31 Desember 2019.

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Tanah	7.340.020.000,00	7.340.020.000,00	0,00	0,00%
Peralatan dan Mesin	88.017.852.492,00	75.052.944.559,00	12.964.907.933,00	17,27%
Gedung dan Bangunan	62.087.007.832,00	61.439.473.172,00	647.534.660,00	1,05%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.788.270.305,00	8.441.139.305,00	1.347.131.000,00	15,96%
Aset Tetap Lainnya	103.485.090,00	103.485.090,00	0,00	0,00%
Akumulasi Penyusutan	-74.960.556.166,18	-62.550.131.221,27	-12.410.424.944,91	19,84%
Jumlah Aset Tetap	92.376.079.552,82	89.826.930.904,73	2.549.148.648,09	2,84%

Mutasi bersih aset tetap tahun 2020 senilai Rp.14.959.573.593,00 yang terdiri dari penambahan senilai Rp.16.224.145.863,00 dan pengurangan senilai Rp.1.264.572.270,00.

Penambahan aset tetap tersebut terjadi karena:

- (1) Penambahan dari belanja modal APBD berupa Alat Kedokteran Umum dan Alat Kedokteran Bedah sebesar Rp.10.083.872.088,00 Bangunan Kesehatan dan Instalasi sebesar Rp.714.675.816,00.
- (2) Penambahan dari belanja modal BLUD berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp.1.940.953.474,00 Gedung dan Bangunan sebesar Rp.541.073.000,00 serta Jaringan dan Instalasi sebesar Rp.1.347.131.000,00
- (3) Penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp.706.823.385,00
- (4) Penambahan dari Inventarisasi Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan sejumlah Rp.147.500.000,00
- (5) Penambahan dari Belanja Tak Terduga (BTT) berupa Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.16.117.100,00
- (6) Penambahan dari Hibah Masyarakat (Penanganan Covid 19) berupa Peralatan dan Mesin sejumlah Rp.726.000.000,00

Sedangkan penurunan aset tetap terjadi karena:

- (1) Koreksi atas pengelompokan aset tetap (Kebijakan Akutansi Daerah) sebesar Rp.2.756.000,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Uraian	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Alat-alat Besar	2.562.172.330,00	2.562.172.330,00	-	0,00%
Alat-alat Angkut	1.723.408.584,00	1.723.408.584,00	-	0,00%
Alat-alat Bengkel	94.533.172,00	91.433.172,00	3.100.000,00	3,39%
Alat-alat Pertanian	16.440.000,00	13.000.000,00	3.440.000,00	26,46%
Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.949.318.301,00	12.535.226.467,00	414.091.834,00	3,30%
Alat Studio dan Komunikasi	280.777.025,00	236.406.225,00	44.370.800,00	18,77%
Alat Kedokteran	66.683.425.028,00	54.401.560.988,00	12.281.864.040,00	22,58%
Alat Laboratorium	1.936.448.452,00	1.913.284.693,00	23.163.759,00	1,21%
Alat Komputer	1.771.329.600,00	1.576.452.100,00	194.877.500,00	12,36%
Jumlah	88.017.852.492,00	75.052.944.559,00	12.964.907.933,00	17,27%

Mutasi bersih tersebut berasal dari penambahan peralatan dan mesin dari Belanja Modal APBD sebesar Rp.10.083.872.088,00 Belanja Modal BLUD sebesar Rp.1.940.953.474,00 penambahan dari Reklasifikasi Aset Tetap senilai Rp.706.823.385,00 penambahan dari Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp.16.117.100,00 penambahan dari hibah masyarakat sejumlah Rp.726.000.000,00 dan pengurangan peralatan dan mesin karena Mutasi Keluar SKPD lain sebesar Rp.84.606.816,00 Reklasifikasi Aset Tetap Rp.139.647.569,00, Reklasifikasi ke Aset Lainnya Rp.281.847.729,00 dan pengelompokkan Ekstra Komptable senilai Rp.2.756.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2020
Rp.13.473.766.047,00**



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

URAIAN	Neraca Awal 2019	Penambahan 2020 (Rp)					Jumlah
	(Rp)	BM APBD	BM BLUD	Barang Jasa	Hibah	Reklas Masuk	(Rp)
Alat Besar	2.562.172.330,00						2.562.172.330,00
Alat Angkutan	1723.408.584,00						1723.408.584,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	91433.172,00		3.100.000,00				94.533.172,00
Alat Pertanian	13.000.000,00			3.440.000,00			16.440.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.535.226.467,00		664.007.318,00				3.199.233.785,00
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	236.406.225,00		48.685.800,00				285.092.025,00
Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	54.401.560.988,00	10.083.872.088,00	100.138.097,00	2.677.100,00	726.000.000,00	706.823.385,00	66.932.322.658,00
Alat Laboratorium	193.284.693,00		23.163.759,00				196.448.452,00
Alat Komputer	1576.452.100,00		200.607.500,00				1777.059.600,00
Jumlah	75.052.944.559,00	10.083.872.088,00	1.940.953.474,00	16.117.100,00	726.000.000,00	706.823.385,00	88.526.710.606,00

Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2020 Rp.508.858.114,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Penambahan gedung dan bangunan Tahun 2020
 Rp.1.403.248.816,00

URAIAN	Neraca Awal 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Inventarisasi	BM APBD	BM BLUD	
Bangunan Gedung	61.348.112.812,00	147.500.000,00	714.675.816,00	346.573.000,00	62.556.861.628,00
Bangunan Menara	91.360.360,00			194.500.000,00	285.860.360,00
Jumlah	61.439.473.172,00	147.500.000,00	714.675.816,00	541.073.000,00	62.842.721.988,00

Pengurangan gedung dan bangunan Tahun 2020
 Rp.755.714.156,00

URAIAN	Saldo setelah penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Koreksi Aset	Reklas Keluar	Reklas ke Aset Lainnya	
Bangunan Gedung	62.556.861.628,00	147.500.000,00	567.175.816,00	41.038.340,00	61.801.147.472,00
Bangunan Menara	285.860.360,00				285.860.360,00
Jumlah	62.842.721.988,00	147.500.000,00	567.175.816,00	41.038.340,00	62.087.007.832,00

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan _____ Rp.9.788.270.305,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.9.788.270.305,00 bertambah sebesar Rp.1.347.131.000,00 atau naik 15,96% dari posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.8.441.139.305,00 seperti terlihat dalam tabel berikut :

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Jalan dan Jembatan	393.996.500,00	393.996.500,00	-	0,00%
Instalasi	8.943.374.305,00	7.596.243.305,00	1.347.131.000,00	17,73%
Jaringan	450.899.500,00	450.899.500,00	-	0,00%
Jumlah	9.788.270.305,00	8.441.139.305,00	1.347.131.000,00	15,96%

Mutasi bersih tersebut berasal dari penambahan Belanja Modal BLUD sebesar Rp. 1.347.131.000,00 seperti tabel berikut :



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroendibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

URAIAN	Neraca Awal 2019	Penambahan	Jumlah
	(Rp)	BM BLUD	(Rp)
Jalan dan Jembatan	393.996.500,00		393.996.500,00
Instalasi	7.596.243.305,00	1.347.131.000,00	8.943.374.305,00
Jaringan	450.899.500,00		450.899.500,00
Jumlah	8.441.139.305,00	1.347.131.000,00	9.788.270.305,00

e. **Aset Tetap Lainnya** _____ **Rp103.485.090,00**

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp.103.485.090,00, atau tetap dan tidak berubah dari posisi per 31 Desember 2019 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Buku dan Kepustakaan	13.735.090,00	13.735.090,00	-	-
Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan	89.750.000,00	89.750.000,00	-	-
Jumlah Aset Tetap Lainnya	103.485.090,00	103.485.090,00	-	-

Selain nilai aset tetap tersebut di atas, juga terdapat barang-barang yang dimasukkan ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel, yaitu barang yang memiliki umur ekonomis lebih dari 12 bulan, tetapi nilainya di bawah satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

Saldo daftar barang ekstrakomptabel per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.756.000,00 dan termasuk dalam kategori peralatan dan mesin yaitu :

Alat rumah tangga meubelair = Rp. 780.000,00
 Alat komunikasi telephone = Rp. 976.000,00 +
 = Rp. 1.756.000,00

3. **Aset Lainnya** _____ **Rp.58.890.130,40**

Aset lainnya merupakan saldo aset yang dimiliki oleh RSUD dr. R. Goeteng Taroendibrata Purbalingga selain Aset Lancar dan Aset Tetap.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	126.103.518	144.709.926	-18.606.408,00	-12,86%
Pendapatan Diterima Dimuka	72.826.667,00	76.250.000,00	-3.423.333,00	-4,49%
Utang Belanja	5.962.830.423,00	6.380.031.993,00	-417.201.570,00	-6,54%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.161.760.608,00	6.600.991.919,00	-439.231.311,00	-6,65%
Jumlah Kewajiban	6.161.760.608,00	6.600.991.919,00	-439.231.311,00	-6,65%
Ekuitas	133.780.908.460,97	125.355.760.428,13	8.425.148.032,84	6,72%
Jumlah Ekuitas	133.780.908.460,97	125.355.760.428,13	8.425.148.032,84	6,72%
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	139.942.669.068,97	131.956.752.347,13	7.985.916.721,84	6,05%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penurunan terdapat pada jumlah Kewajiban yaitu turun 6,65% atau turun sebesar Rp.439.231.311,00 sedangkan pada jumlah ekuitas mengalami kenaikan hingga 6,72% atau naik sebesar Rp.8.425.148.032,84 dari posisi per 31 Desember 2019.

5.3.2.2.1 Kewajiban Rp.6.161.760.608,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp.6.161.760.608,00 mengalami penurunan sebesar Rp.439.231.311,00 atau turun 6,65% dari saldo kewajiban per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.6.600.991.919,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	126.103.518,00	144.709.926,00	-18.606.408,00	-12,86%
Pendapatan Diterima Dimuka	72.826.667,00	76.250.000,00	-3.423.333,00	-4,49%
Utang Belanja	5.962.830.423,00	6.380.031.993,00	-417.201.570,00	-6,54%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.161.760.608,00	6.600.991.919,00	-439.231.311,00	-6,65%
Jumlah Kewajiban	6.161.760.608,00	6.600.991.919,00	-439.231.311,00	-6,65%



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Secara rinci kewajiban tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga _____ Rp.126.103.518,00

Saldo Utang perhitungan pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp.126.103.518,00 mengalami penurunan sebesar Rp.18.606.408,00 atau turun 12,86% dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.144.709.926,00.

Utang PFK ini merupakan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Pegawai Tidak Tetap RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga bulan Desember 2020 yang belum disetorkan ke Bank BRI sebesar Rp.78.408.493,00 dan Utang Jaminan Pemeliharaan pihak ketiga sebesar Rp.47.695.025,00

b. Pendapatan Diterima Dimuka _____ Rp.72.826.667,00

Saldo Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp.72.826.667,00 mengalami penurunan sebesar Rp.3.423.333,00 atau turun 4,49% dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.76.250.000,00.

Pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa / mahasiswi dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri / Swasta dengan perjanjian / MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit sebesar Rp.25.660.000,00 dan Pendapatan dari Sewa Lahan Bank Jateng sebesar Rp.47.166.667,00.

Secara rinci pendapatan diterima dimuka dapat dilihat pada Lampiran XII Daftar Pendapatan Diterima Di Muka Per 31 Desember 2020.

c. Utang Belanja _____ Rp.5.962.830.423,00

Saldo utang belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.962.830.423,00 mengalami penurunan sebesar 6,54% atau turun Rp.417.201.570,00 dari saldo utang belanja per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.6.380.031.993,00.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Saldo utang belanja tersebut terdiri dari :

Utang Belanja Rapel Gaji 2020	Rp.	33.023.816,00
Utang Belanja Jasa Medis 2020	Rp.	3.510.604.000,00
Utang Belanja TamsilPeg. 2020	Rp.	572.048.000,00
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 2020	Rp.	64.551.160,00
Utang Belanja Obat-obatan 2020	Rp.	548.553.570,00
Utang Belanja Alkes 2020	Rp.	879.268.815,00
Utang Belanja Laboratorium 2020	Rp.	22.719.994,00
Utang Belanja Jasa Pihak Ketiga 2020	Rp.	98.486.968,00
Utang Belanja Bahan Jasa Perkantoran	Rp.	233.574.100,00
	Rp.	5.962.830.423,00

Rincian Utang Belanja 2020 dapat dilihat pada Lampiran XIII Daftar Utang Belanja Per 31 Desember 2020.

5.3.2.2.2 Ekuitas Rp.133.780.908.460,97

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp.133.780.908.460,97 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.425.148.032,84 atau naik 6,72% dari saldo ekuitas per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.125.355.760.428,13 seperti dalam tabel berikut :

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Ekuitas	133.780.908.460,97	125.355.760.428,13	8.425.148.032,84	6,72%
Jumlah Ekuitas	133.780.908.460,97	125.355.760.428,13	8.425.148.032,84	6,72%

Ekuitas tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp.	125.355.760.428,13
Defisit LO	(Rp.)	32.065.646.146,56
Koreksi Mutasi Aset Tetap	(Rp.)	23.233.839,60
Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp.	57.632.165,00
Koreksi Saldo Awal	Rp.	272.305.380,00
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	Rp.	<u>40.184.090.474,00</u>



5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun terkait dengan penerapan SAP Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak menerapkan penyajian kembali (restatement) terhadap Laporan Operasional tahun 2018 sehingga dalam penjelasan di bawah ini, tidak ada perbandingan antara Laporan Operasional tahun 2020 dengan Laporan Operasional tahun 2019.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Kegiatan Operasional yaitu pendapatan-LO dan beban serta kegiatan non operasional yaitu Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. **Beban** adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Realisasi Pendapatan-LO RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun 2020 sebesar Rp.96.166.725.773,00 atau mencapai 120,21% dari target sebesar Rp.80.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO sejumlah Rp.93.340.393.493,00 dan Pendapatan Hibah - LO senilai Rp.2.826.332.280,00

Realisasi Beban RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp.127.953.823.836,76 atau mencapai 146,00% dari anggaran sebesar Rp.87.641.355.000,00. Realisasi Beban tersebut terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp.65.060.157.455,00, Beban Persediaan sebesar Rp.33.237.906.249,00, Beban Jasa sebesar Rp.12.736.205.839,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp.3.698.281.899,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp.101.023.500, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.13.008.099.239,91 dan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp.112.149.654,85, Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (Penghapusan Aset Lain-lain) Rp.278.548.082,80

Dari realisasi Pendapatan dan Beban tersebut, maka pada tahun 2020, terdapat defisit sebelum pos luar biasa sebesar Rp.32.065.646.146,56.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

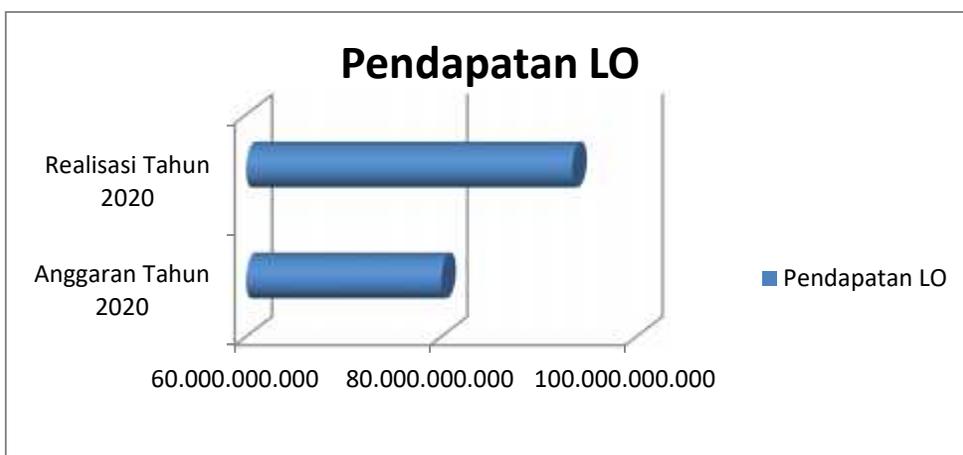
Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Operasional sebagaimana berikut:

5.4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN

LO _____ Rp.96.166.725.773,00

Realisasi Pendapatan tahun 2020 sebesar Rp.96.166.725.773,00 atau mencapai 120,21% dari target sebesar Rp.80.000.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah.



Pendapatan Asli Daerah (PAD) _____ Rp.93.340.393.493,00

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 sebesar Rp.93.340.393.493,00 atau turun 11,43% dari realisasi tahun 2019 yaitu sebesar Rp.105.385.142.844,00 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

URAIAN	31-Dec-20	31-Dec-19	Kenaikan / Penurunan	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	93.340.393.493,00	105.385.142.844,00	- 12.044.749.351,00	-11,43%

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut merupakan Lain-lain PAD yang Sah yang terdiri dari :

Pendapatan Jasa Layanan Kesehatan 2020 Rp. 113.351.405.492,00
 Pendapatan diterima dimuka 2019 Rp. 76.250.000,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Penerimaan Piutang 2020		Rp.
8.618.196.443,00		
Pelunasan Piutang 2019	(Rp. 28.632.631.775,00)	
Pendapatan diterima dimuka 2020	(Rp. <u>72.826.667,00</u>)	
Jumlah Pendapatan LO	Rp. 93.340.393.493,00	

Dilihat dari nilai kontribusinya, Pendapatan dari Jasa Layanan Kesehatan menjadi yang terbesar dengan nilai Rp.113.351.405.492,00 atau 121,44% dari total Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO.

Pendapatan diterima dimuka tahun 2019 sebesar Rp.76.250.000,00 merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa / mahasiswi dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri / Swasta dengan perjanjian / MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit.

Penerimaan Piutang 2020 sebesar Rp.8.618.196.443,00 berasal dari Piutang Asuransi 2020, Piutang Pasien 2020, Piutang Pendapatan Diklat 2020 dan Piutang Sewa Lapak PKL 2020 sebagaimana rincian berikut :

Piutang Asuransi 2020	Rp. 8.560.839.350,00
Piutang Pasien 2020	Rp. 29.000.393,00
Piutang Diklat 2020	Rp. 27.075.000,00
Piutang Sewa / Lapak dll 2020	Rp. <u>1.281.700,00</u>
Penerimaan Piutang 2020	Rp. 8.618.196.443,00

Pelunasan Piutang 2019 sebesar Rp.28.632.631.775,00 berasal dari Pelunasan piutang Asuransi tahun 2019 sebesar Rp.28.593.637.063,00, pelunasan pendapatan Diklat tahun 2019 sebesar Rp.9.440.000,00, pelunasan pendapatan sewa lapak PKL sebesar Rp.29.000.000,00 dan pelunasan piutang pasien tahun 2019 sebesar Rp.554.712,00.

Pendapatan diterima dimuka 2020 sebesar Rp.72.826.667,00 merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa / mahasiswi dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri / Swasta dengan perjanjian / MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan Rumah Sakit sebesar



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Rp.25.660.000,00 dan Hutang Sewa Lahan Bank Jateng sebesar
47.166.667,00

Pendapatan Hibah _____ **Rp.2.826.332.280,00**

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2020 sebesar Rp.2.826.332.280,00 atau naik 100% dari Tahun 2019 dikarenakan pada Tahun 2019 tidak terdapat realisasi dari Pendapatan Hibah.

Pendapatan Hibah Tahun 2020 terdiri dari :

Hibah Kelompok Masyarakat (Aset Tetap)	Rp.	726.000.000,00
Hibah Kelompok Masyarakat (Persediaan)	<u>Rp.</u>	<u>2.100.332.280,00</u>
Pendapatan Hibah	Rp.	2.826.332.280,00

B. BEBAN _____ **Rp.127.953.823.836,76**

Beban RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga tahun 2020 sebesar Rp.127.953.823.836,76 atau turun 3,80% yaitu sebesar Rp.5.060.583.806,08 dari realisasi Tahun 2019. Realisasi Beban tersebut terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp.65.060.157.455,00 (50,85%), Beban Persediaan sebesar Rp.33.237.906.249,00 (25,98%), Beban Jasa sebesar Rp.12.736.205.839,00 (9,95%), Beban Pemeliharaan sebesar Rp.3.698.281.899,00 (2,89%), Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp.101.023.500 (0,08%), Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp.13.008.099.239,91 (10,17%) dan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp.112.149.654,85 (0,09%).

1. Beban Pegawai _____ **Rp.65.060.157.455,00**

Beban Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Realisasi Beban Pegawai tahun 2020 sebesar Rp.65.060.157.455,00, terdiri dari :

URAIAN	Belanja Pegawai LRA 2020	Penyesuaian Utang Belanja Tahun 2019	Penyesuaian Utang Belanja Tahun 2020	Beban Pegawai LO 2020
	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5 = 2-3+4
BELANJA APBD	26.885.565.294,00	22.440.304,00	97.574.976,00	26.960.699.966,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	26.885.565.294,00	22.440.304,00	97.574.976,00	26.960.699.966,00
Gaji Pokok PNS	20.153.640.400,00	3.341.200,00	15.694.000,00	20.165.993.200,00
Tunjangan Keluarga	1.865.417.326,00	345.892,00	1.777.998,00	1.866.849.432,00
Tunjangan Jabatan	136.590.000,00			136.590.000,00
Tunjangan Fungsional	2.058.278.000,00	18.610.000,00	13.450.000,00	2.053.118.000,00
Tunjangan Fungsional Umum	377.195.000,00		20.000,00	377.215.000,00
Tunjangan Beras	1.029.595.140,00		144.840,00	1.029.739.980,00
Tunjangan PPh / Khusus	82.697.865,00		640.877,00	83.338.742,00
Pembulatan Gaji	267.587,00	515,00	122,00	267.194,00
Iuran Asuransi Kesehatan	101.080.413,00	110.606,00	65.700.960,00	108.1670.767,00
Iuran Jaminan Kematian	124.353.536,00	24.061,00	109.640,00	124.439.115,00
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	41.450.027,00	8.030,00	36.539,00	41.478.536,00
BELANJA BLUD	7.056.371.750,00	4.130.696.500,00	35.173.782.239,00	38.099.457.489,00
PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN BLUD	7.056.371.750,00	4.130.696.500,00	35.173.782.239,00	38.099.457.489,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	154.045.750,00			154.045.750,00
Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	18.900.000,00			18.900.000,00
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	22.900.000,00			22.900.000,00
Honorarium Pengelolaan Keuangan pada SKPD	254.610.000,00			254.610.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Non PNS)	70.035.500,00			70.035.500,00
Uang Lembur PNS	18.347.000,00			18.347.000,00
Uang Lembur Non PNS	8.228.000,00			8.228.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.389.905.500,00	497.928.500,00	560.948.000,00	6.452.925.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	119.400.000,00	9.950.000,00	11.100.000,00	120.750.000,00
Utang Belanja Jasa Medis		3.622.818.000,00	3.510.604.000,00	- 112.214.000,00
Reklas Belanja Jasa Medis			3.109.130.239,00	3.109.130.239,00
Jumlah Belanja Pegawai	33.941.937.044,00	4.153.136.804,00	35.271.357.215,00	65.060.157.455,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Perbedaan nilai realisasi Belanja Pegawai–LRA sebesar Rp.33.941.937.044,00 dan Beban Pegawai–LO sebesar Rp.65.060.157.455,00 terjadi karena terdapat Utang Belanja Pegawai tahun 2019 yang dibayarkan di tahun 2020 sebagaimana rincian sebagai berikut :

Utang Belanja Pegawai 2020 (Rapel Gaji)	Rp.	97.574.976,00
Utang Belanja Pegawai 2020 (Jasa Medis)	Rp.	3.510.604.000,00
Utang Belanja Pegawai 2020 (Tamsil Peg.)	Rp.	572.048.000,00
Belanja Pegawai LRA 2020	Rp.	33.941.937.044,00
Reklas Jasa Medis 2020	Rp.	31.091.130.239,00
Utang Belanja Pegawai 2019 (Rapel Gaji)	(Rp.	22.440.304,00)
Utang Belanja Pegawai 2019 (Tamsil Peg.)	(Rp.	507.878.500,00)
Utang Belanja Pegawai 2019 (Jasa Medis)	<u>(Rp.</u>	<u>3.622.818.000,00)</u>
Beban Pegawai LO 2018	Rp.	65.060.157.455,00

2. **Beban Persediaan**

Realisasi Beban Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp.33.237.906.249,00, terdiri dari :

Persediaan LRA 2019	Rp.	33.146.680.608,00
Beban Persediaan 2020	(Rp.	6.344.237.733,00)
Beban Persediaan 2019	Rp.	5.067.212.839,00
Beban Persediaan Hibah 2020	Rp.	2.100.332.280,00
Persediaan BTT 2020	Rp.	41.515.065,00
Utang Beban Persediaan (Obat, Alkes, Laboratorium) 2020	Rp.	1.450.542.379,00
Utang Beban Persediaan (Obat, Alkes, Laboratorium) 2019	(Rp.	2.226.895.189,00)
Beban Ekstrakom 2020	<u>Rp.</u>	<u>2.756.000,00</u>
Jumlah Beban Persediaan	Rp.	33.237.906.249,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

3. Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa tahun 2020 sebesar Rp.12.736.205.839,00, terdiri dari :

Belanja Jasa LRA 2020	Rp.	12.405.880.818,00
Utang Jasa Pihak Ketiga 2020	Rp.	98.486.968,00
Utang Jasa Pelayanan Kesehatan 2020	Rp.	52.184.100,00
Beban Jasa Premi Asuransi Dibayar Di Muka 2019	Rp.	47.996.274,00
Beban Jasa Premi Asuransi Dibayar Di Muka 2020	(Rp.	49.732.321,00)
Utang Sewa 2020	<u>Rp.</u>	<u>181.390.000,00</u>
=		
Jumlah Beban Jasa	Rp.	12.736.205.839,00

4. Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2020 sebesar Rp.3.698.281.899,00, merupakan belanja pemeliharaan Tahun 2020 yang terdiri dari :

Belanja Jasa Service	Rp.	12.734.680,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	Rp.	42.988.500,00
Belanja BBM/Gas dan Pelumas	Rp.	18.659.061,00
Belanja STNK	Rp.	5.720.225,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp.	1.829.423.890,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp.	446.525.850,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran	Rp.	1.247.629.693,00
Belanja Pemeliharaan SIM	<u>Rp.</u>	<u>94.600.000,00</u>
Jumlah Beban Pemeliharaan	Rp.	3.698.281.899,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

5. Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 sebesar Rp.101.023.500,00 merupakan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 yang terdiri dari :

Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp.
8.745.000,00	
Perjalanan Dinas Luar Daerah	<u>Rp.</u>
<u>92.278.500,00</u>	
Jumlah	Rp.
101.023.500,00	

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi _____Rp.13.008.099.239,91

Beban Penyusutan Aset Tetap Tahun 2020 sebesar Rp.13.008.099.239,91, terdiri dari beban penyusutan aset tetap seperti pada tabel berikut :



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Umur Piutang > 5 tahun = Piutang pasien < Tahun 2016 sebesar Rp.981.648.810,00

a. Perhitungan penyisihan piutang 2020:

>1-2 tahun = 25% x Rp. 68.494.075,00 = Rp. 17.123.518,75

>2-3 tahun = 35% x Rp. 81.063.405,00 = Rp. 28.372.191,75

>3-4 tahun = 50% x Rp. 104.692.714,00 = Rp. 52.346.357,00

>4-5 tahun = 75% x Rp. 195.241.893,00 = Rp. 146.431.419,75

>5 tahun = 100% x Rp.981.648.810,00 = Rp. 981.648.810,00 +

Penyisihan Piutang 2020 = **Rp.1.225.922.297,25**

b. Penyisihan Piutang 2019 = **(Rp.1.113.772.642,40)**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang 2020 = **Rp. 112.149.654,85**

Rincian Perhitungan Penyisihan Piutang terdapat pada Lampiran V Tabel Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2020.

5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

5.5.1 PENJELASAN UMUM ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas BLUD selama periode tertentu.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi yang terjadi pada Rekening Kas yang dikelola oleh BLUD.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara BLUD (Arus kas masuk)



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara BLUD (Arus kas keluar)

5.5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1. Arus Kas Masuk

Lain-lain PAD yang Sah _____ **Rp.113.351.405.492,00**

Saldo Penerimaan Kas (Arus kas masuk) per 31 Desember 2020 sebesar Rp.113.351.405.492,00 mengalami peningkatan sebesar 8,82% atau naik Rp.9.189.863.775,00 dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.104.161.541.717,00.

Saldo ini merupakan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Pendapatan BLUD) yang terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp.111.289.565.960,00, Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD sebesar Rp.262.367.852,00 dan Pendapatan Lain-lain BLUD sebesar Rp.1.799.471.680,00 sebagaimana dirinci dan dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran – Pendapatan dan dapat diringkas seperti pada tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
	Pendapatan BLUD	113.351.405.492,00	104.161.541.717,00
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	111.289.565.960,00	102.216.210.529,00
2	Pendapatan Hasil Kerjasama	262.367.852,00	527.321.911,00
3	Pendapatan Lain-lain	1.799.471.680,00	1.418.009.277,00

2. Arus Kas Keluar

 _____ **Rp.84.999.391.538,00**

Saldo Pengeluaran Kas (Arus kas keluar) per 31 Desember 2020 sebesar Rp.84.999.391.538,00 mengalami penurunan sebesar Rp.6.367.800.393,00 atau turun 6,97% dari posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.91.367.191.931,00.

Arus kas keluar ini terdiri dari :

a) Belanja Pegawai _____ **Rp.7.056.371.750,00**

Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.7.056.371.750,00 mengalami penurunan sebesar 3,24% atau turun Rp.236.382.400,00 dari posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp.7.292.754.150,00.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Realisasi ini merupakan Belanja Pegawai BLUD tahun 2020 sebagaimana telah dirinci dan dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran – Belanja Pegawai dan dapat dirinci seperti pada tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
	Belanja Pegawai	7.056.371.750,00	7.292.754.150,00
1	Honorarium	520.491.250,00	565.845.500,00
2	Uang Lembur	26.575.000,00	165.936.000,00
3	Tambahan Penghasilan	6.509.305.500,00	6.560.972.650,00

b) Belanja Barang dan Jasa _____ Rp.77.943.019.788,00

Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sejumlah Rp.77.943.019.788,00 mengalami penurunan sebesar 7,29% atau turun Rp.6.131.417.993,00 dari posisi 31 Desember 2019 sebesar Rp.84.074.437.781,00.

Realisasi ini merupakan Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2020 sebagaimana telah dirinci dan dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran – Belanja Barang dan Jasa dan dapat dirinci seperti pada tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
1	Bahan Pakai Habis	1.753.807.368,00	1.496.086.555,00
2	Bahan Material	25.258.725.529,00	25.217.141.238,00
3	Jasa Kantor	43.030.719.569,00	48.744.931.362,00
4	Premi Asuransi	156.039.263,00	101.289.645,00
5	Perawatan Kendaraan Bermotor	80.102.466,00	117.834.125,00
6	Cetak dan Penggandaan	562.437.900,00	698.410.150,00
7	Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	67.857.375,00	54.442.532,00
8	Makanan dan Minuman	2.886.400.635,00	3.269.372.932,00
9	Pakaian Dinas dan Atributnya	61.708.000,00	1.025.000,00
10	Pakaian Kerja	123.623.900,00	19.347.375,00
11	Perjalanan Dinas	101.023.500,00	260.602.330,00
12	Pemeliharaan	3.618.179.433,00	3.371.065.771,00
13	Beasiswa Pendidikan PNS	-	12.000.000,00
14	Kursus, Pelatihan	242.394.850,00	710.888.766,00
	Jumlah	77.943.019.788,00	84.074.437.781,00



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

3. Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Rp.28.352.013.954,00

Saldo Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.28.352.013.954,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.606.480.996,00 atau naik sebesar 121,60% dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp.12.794.349.786,00.

Saldo ini merupakan pengurangan dari Saldo Arus kas masuk dengan Saldo Arus kas keluar tahun 2020.

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
1	Arus Kas Masuk	113.351.405.492,00	104.161.541.717,00
2	Arus Kas Keluar	84.999.391.538,00	91.367.191.931,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	28.352.013.954,00	12.794.349.786,00

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

1. Arus Kas Masuk _____ Rp.0,00

Tidak ada Saldo Arus kas masuk dari aktivitas investasi per 31 Desember 2020 sama seperti Saldo per 31 Desember 2019.

2. Arus Kas Keluar _____ Rp.3.829.157.474,00

Saldo Arus kas keluar per 31 Desember 2020 sebesar Rp.3.829.157.474,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.349.587.388,00 atau turun 38,03% dari posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.6.178.744.862,00.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
	Arus Kas Keluar		
1	BM Peralatan dan Mesin	1.940.953.474,00	1.492.839.496,00
2	BM Gedung dan Bangunan	541.073.000,00	4.247.255.366,00
3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.347.131.000,00	438.650.000,00
	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	3.829.157.474,00	6.178.744.862,00

3. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi (Rp.3.829.157.474,00)

Saldo Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.-3.829.157.474,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.349.587.388,00 atau naik sebesar 38,03% dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp.-6.178.744.862,00.

Saldo ini merupakan pengurangan dari Saldo Arus kas masuk dengan Saldo Arus kas keluar dari aktivitas investasi Tahun 2020.

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
1	Arus Kas Masuk	-	-
2	Arus Kas Keluar	3.829.157.474,00	6.178.744.862,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	-3.829.157.474,00	-6.178.744.862,00

C. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, penyetoran kas di bendahara penerimaan, serta kiriman uang.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
	Arus Kas Keluar		
1	Penerimaan PFK BPJS / Askes	76.900.201,00	-
2	Penerimaan PFK PPh Ps.21	2.429.802.527,00	-
3	Penerimaan PFK PPh Ps.22	409.427.977,00	-
4	Penerimaan PFK PPh Ps.23	72.707.838,00	-
5	Penerimaan PFK PPh Ps. 4	34.972.903,00	-
6	Penerimaan PFK PPh Pusat	3.163.340.397,00	-
7	Penerimaan PFK Retensi	34.300.100,00	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	6.221.451.943,00	-

3. Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris (Rp.18.606.408,00)

Saldo Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2020 sebesar Rp.-18.606.408,00 mengalami penurunan sebesar Rp.163.316.334,00 atau turun sebesar 112,86% dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp.144.709.926,00.

Saldo ini merupakan pengurangan dari Saldo Arus kas masuk dengan Saldo Arus kas keluar dari aktivitas transitoris Tahun 2020.

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
1	Arus Kas Masuk	6.202.845.535,00	144.709.926,00
2	Arus Kas Keluar	6.221.451.943,00	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-18.606.408,00	144.709.926,00

D. Kenaikan / (Penurunan) Kas Rp.24.504.250.072,00

Saldo Kenaikan / (Penurunan) Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp.24.504.250.072,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.17.743.935.222,00 atau naik sebesar 262,47% dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp.6.760.314.850,00.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Kenaikan / (Penurunan) Kas tampak seperti tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
	Kenaikan / (Penurunan) Kas		
1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	28.352.013.954,00	12.794.349.786,00
2	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	-3.829.157.474,00	-6.178.744.862,00
3	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	-18.606.408,00	144.709.926,00
	Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Kas	24.504.250.072,00	6.760.314.850,00

E. Saldo **Akhir**
Kas **Rp.32.290.314.289,00**

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp.32.290.314.289,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.24.504.250.072,00 atau naik sebesar 314,72% dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp.7.786.064.217,00.

Saldo Akhir Kas merupakan penjumlahan dari Kenaikan Kas sebesar Rp.24.504.250.072,00 ditambah dengan Saldo Awal Kas Tahun 2020 atau Saldo Akhir Kas Tahun 2019 sebesar Rp.7.786.064.217,00, seperti pada tabel berikut :

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020	Tahun Anggaran 2019
		(Rp)	(Rp)
	Saldo Akhir Kas		
1	Kenaikan / (Penurunan) Kas	24.504.250.072,00	6.760.314.850,00
2	Saldo Awal Kas	7.786.064.217,00	1.025.749.367,00
	Jumlah Saldo Akhir Kas	32.290.314.289,00	7.786.064.217,00

5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

A. Ekuitas Awal **Rp.125.355.760.428,13**

Ekuitas awal tahun 2020 berasal dari saldo ekuitas akhir tahun 2019 sebesar Rp.125.355.760.428,13



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

B.

efisit-LO _____ **(Rp.32.065.646.146,56)**

Defisit – LO tahun 2020 berasal dari realisasi Pendapatan LO 2020 sebesar Rp.96.166.725.773,00 dikurangi realisasi Beban 2020 sebesar Rp.127.953.823.836,76 dikurangi defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp.278.548.082,80 sehingga terdapat Defisit LO sebesar Rp.32.065.646.146,56.

C. Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap _____ **(Rp.23.233.839,60)**

Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap tahun 2020 sebesar Rp.23.233.839,60 berasal dari penambahan dan pengurangan ekuitas akibat

No.	Uraian	Pengurangan	Penambahan
		(Rp)	(Rp)
1	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Meubelair)	40.259.240,40	
2	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Alat Komunikasi)	975.800,00	
3	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Alat Kedokteran Umum)	2.400.000,00	
4	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Alat Kedokteran Gawat Darurat)	28.639.728,00	
5	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Aset Lain-lain)		58.890.130,40
6	Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap (Rumah Negara Golongan III)	9.849.201,60	
	Jumlah	82.123.970,00	58.890.130,40
	Pengurangan Ekuitas	23.233.839,60	

mutasi aset tetap sebagaimana rincian pada tabel berikut :

D. Koreksi Ekuitas Lainnya _____ **Rp.57.632.165,00**

Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp.57.632.165,00 berasal dari :

- Koreksi Ekuitas Lainnya karena pencatatan
Aset Tetap dari BTT 2020 Rp. 16.117.100,00
 - Koreksi Ekuitas Lainnya karena pencatatan
Saldo Akhir persediaan dari BTT 2020 Rp. 41.515.065,00
- Saldo Koreksi Ekuitas Lainnya** **Rp. 57.632.165,00**

E. Koreksi Ekuitas karena Koreksi Saldo Awal _____ **Rp.272.305.380,00**

Saldo koreksi Saldo Awal per 31 Desember 2020 sebesar Rp.272.305.380,00 mengalami peningkatan sebesar 92440,85% atau naik



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Rp.272.011.125,76 dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sebesar
Rp.294.254,24.

F. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan _____ Rp.40.184.090.474,00

Saldo kewajiban untuk dikonsolidasikan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.40.184.090.474,00 mengalami penurunan sebesar 16,36% atau turun Rp.7.858.659.042,00 dari saldo per 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp.48.042.749.516,00.

Saldo tersebut merupakan kewajiban SKPD yang akan dikonsolidasikan yang merupakan R/K SKPD.

G. Ekuitas Akhir _____ Rp.133.780.908.460,97

Ekuitas akhir tahun 2020 berasal dari saldo ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp.125.355.760.428,13 dikurangi dengan defisit LO tahun 2020 sebesar Rp.32.065.646.146,56 dikurangi dengan koreksi ekuitas karena mutasi aset tetap sebesar Rp.23.233.839,60 ditambah dengan koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.57.632.165,00 ditambah dengan koreksi ekuitas karena koreksi Saldo Awal sejumlah Rp.272.305.380,00 dan ditambah dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2020 sebesar Rp.40.184.090.474,00 sehingga ekuitas akhir adalah Rp.133.780.908.460,97.



Pemerintah Kabupaten Purbalingga
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

BAB VI
PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan belanja RSUD dr.R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga berbanding lurus, jika pendapatan naik maka belanja pun mengalami kenaikan. Dalam pengelolaan Anggaran Tahun 2020 secara keseluruhan RSUD dapat melaksanakan secara efektif dan efisien yang dapat dilihat dari selisih antara anggaran dan realisasi.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga Tahun Anggaran 2020 telah disajikan secara sistematis agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya serta dalam mengambil satu kebijakan untuk RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga.

Plt. Direktur RSUD
dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga


dr. SULISTYA RINI CANDRA DEWI, M.Kes
Pembina
NIP. 19720110 200212 2 003